

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA *INTERNET*
BANKING DARI KEJAHATAN *CYBER CRIME* STUDI PADA PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH PADANG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas**

OLEH:

RETNO ADHILLA PUTRI

1510111098

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Dosen Pembimbing

- 1. Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H.,M.H.**
- 2. Upita Anggunsuri,S.H.,M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENGGUNA *INTERNET BANKING* DARI KEJAHATAN
CYBERCRIME STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK KANTOR
WILAYAH PADANG**

(Retno Adhilla Putri, 1510111098, Hukum Perdata Murni,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 109 Halaman, Tahun 2020)

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi informasi dikenal dengan *E-Banking* yang memberikan banyak kemudahan dalam pelayanan pada nasabah sudah menjadi andalan dunia perbankan. Salah satu produk bank yang terkait dengan *E-Banking* adalah *Internet Banking*. Sebagai mana produk perkembangan teknologi lainnya yang memiliki dampak yang tidak hanya positif tapi juga negatif termasuk *Internet Banking* dengan munculnya kejahatan *Cybercrime* yakni kejahatan yang dilakukan terhadap sistem atau jaringan komputer yang menimbulkan kerugian secara finansial kepada nasabah bank. Oleh karena itu nasabah harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan serta sistem keamanan operasional bank. Dalam penulisan ini yang menjadi rumusan masalah adalah 1) bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap penggunaan *Internet Banking* dari kejahatan *Cybercrime* di PT BRI (Persero) Tbk kantor wilayah padang, 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam transaksi melalui *Internet Banking* dari kejahatan *Cybercrime* di PT BRI (Persero) Tbk kantor wilayah Padang dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris (*empiris research*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya edukasi ataupun penjelasan regulasi bank pada nasabah tentang kemungkinan dampak penggunaan *Internet Banking* sehingga penerapan hukum preventif belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen no. 8 tahun 1999 pasal 4 tentang hak dan kewajiban konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka perlu hendaknya pihak bank memberikan edukasi kepada nasabah terkait dengan *Internet Banking*, tidak hanya regulasi prosedur dan syarat pengaktifan dan penggunaan tapi juga bagaimana antisipasi keamanan dalam penggunaan *Internet Banking* agar tindakan *Cybercrime* tidak terjadi.

Kata Kunci: *Internet Banking, Cybercrime*

